

Kerjasama Negara-Negara APEC dalam Mengatasi Ketimpangan Infrastruktur untuk Mencapai Pembangunan Internasional Pasca Pandemi Covid-19

Shafira Aulia*¹, Naufal Hilmi Nugroho², Ridlo Bayu Alam Dewantoro³, Deasy Silvyia Sari⁴, R. Dudy Heryadi⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran
Jalan Raya Jatinangor KM 21 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45363

e-mail: *¹shafira21008@mail.unpad.ac.id, ²naufal21012@mail.unpad.ac.id, ³ridlo21001@mail.unpad.ac.id, ⁴deasy.silvyia@unpad.ac.id, ⁵dudy.heryadi@unpad.ac.id

Abstract

During the COVID-19 pandemic, APEC member countries faced major challenges in achieving infrastructure development goals due to the COVID-19 pandemic impacting various aspects of people's lives and the economy, thus they looked for a way out. This article will use the theories of International Cooperation, International Development, and Dependencies. Issues will be discussed through qualitative research methods and analysis of secondary data sources. In overcoming this issue, APEC carried out the continuation of the plan of APEC Putrajaya Vision 2040, Experience Exchange, and the Belt Road Initiative. The cooperation that was carried out resulted in assistance in facilitating economic cooperation and regional integration. Even so, the cooperation that was carried out was planned even before the COVID-19 pandemic and was only carried out more actively to overcome the impact of the COVID-19 pandemic that was present.

Keywords— APEC, Infrastructure inequality, International development

Abstrak

Selama pandemi COVID-19, negara-negara anggota APEC menghadapi tantangan besar dalam mencapai tujuan pembangunan infrastruktur dikarenakan pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan ekonomi, sehingga mereka mencari jalan keluar untuk isu ini. Artikel ini akan menggunakan teori Kerjasama Internasional, Pembangunan Internasional, dan Dependensi. Isu akan dibahas melalui metode penelitian kualitatif dan analisis sumber data sekunder. Dalam mengatasi hal tersebut, APEC melaksanakan kelanjutan dari APEC Putrajaya Vision 2040, Experience Exchange, dan Belt Road Initiative. Kerja sama yang dilakukan menghasilkan bantuan fasilitas kerjasama ekonomi dan integrasi regional. Meski begitu, kerja sama yang dilakukan sebenarnya telah direncanakan bahkan sebelum pandemi COVID-19 dan hanya dilakukan dengan lebih giat untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 yang hadir.

Kata kunci— APEC, Ketimpangan infrastruktur, Pembangunan internasional

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Istilah pembangunan sendiri, atau self-development, adalah konsep yang sering digunakan dan dikenal luas,

terutama dalam konteks situasi negara-negara anggota APEC selama pandemi COVID-19. Pembangunan sendiri mengacu pada kemajuan suatu bangsa atau kelompok dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perubahan fisik

seperti fasilitas dan infrastruktur, serta kemajuan dalam bidang teknologi dan sejenisnya. Pembangunan sendiri melibatkan banyak nilai, tujuan, strategi, dan program yang saling mendukung, serta diharapkan dapat menghasilkan hasil yang diinginkan.

Pembangunan internasional atau global, dalam konteks APEC, adalah konsep yang mencakup upaya pembangunan dalam skala yang lebih luas, melibatkan berbagai negara dan masyarakat di dalamnya. Konsep ini juga digunakan sebagai faktor atau klasifikasi untuk menilai tingkat perkembangan suatu negara, baik itu negara maju, semi berkembang, atau berkembang, dalam skala internasional. Hal ini disebabkan oleh variasi praktik dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tingkat atau target pembangunan, yang dapat menentukan kemampuan suatu negara dalam melaksanakan pembangunan. Dalam konteks internasional, pembangunan juga melibatkan hubungan dan relasi antarnegara, yang mempengaruhi perkembangan suatu negara dan memudahkan pelaksanaan banyak hal terkait pembangunan.

Namun, selama pandemi COVID-19, negara-negara anggota APEC menghadapi tantangan besar dalam mencapai tujuan pembangunan. Pandemi ini telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan ekonomi, termasuk pembangunan fisik, teknologi, dan sektor-sektor lainnya. Pembatasan pergerakan, penurunan ekonomi, dan kerentanan sektor kesehatan menjadi tantangan serius bagi upaya pembangunan. Negara-negara anggota APEC harus beradaptasi dengan situasi yang sulit ini dan menghadapi tantangan dalam melanjutkan upaya pembangunan mereka. Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga memperlihatkan pentingnya kerja sama

internasional dalam menghadapi tantangan bersama. Negara-negara anggota APEC telah bekerja sama untuk menghadapi pandemi, termasuk dalam hal pertukaran informasi, pengadaan vaksin, dan kerjasama ekonomi. Kerja sama ini menunjukkan pentingnya hubungan dan relasi antarnegara dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan saling terkait seperti pandemi COVID-19. Dalam hal ini, pembangunan sendiri dan pembangunan internasional atau global menjadi faktor penting bagi negara-negara anggota APEC dalam menghadapi pandemi COVID-19. Upaya pembangunan harus diarahkan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi akibat pandemi, termasuk dalam memperkuat infrastruktur kesehatan, memajukan teknologi, dan mengatasi dampak ekonomi.

Infrastruktur juga telah diakui secara luas sebagai salah satu faktor krusial dalam pembangunan internasional, yang mana tingkat infrastruktur pun tentu beragam di lingkup internasional. Infrastruktur yang dimiliki negara-negara tingkat maju, semi berkembang, dan berkembang pun tentu akan berbeda. Hal ini pun tentu akan mendorong setiap negara untuk meningkatkan infrastruktur mereka melalui hal-hal atau jalur yang tersedia, di mana salah satunya ialah bentuk kerjasama yang akan dapat membangun atau meningkatkan aspek infrastruktur tersebut.

Di dunia yang selalu berkembang sesuai arus globalisasi, proses pembangunan internasional menjadi semakin kompleks. Terlebih dengan adanya isu-isu seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan infrastruktur akibat perang, maka diperlukan kerja sama antar aktor internasional untuk mengatasi masalah tersebut. Perang Dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet menimbulkan dampak besar terhadap ekonomi politik dunia

internasional. Oleh karena itu, para aktor internasional mengawasi pembuatan regulasi yang lebih terarah untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Regulasi dan kebijakan yang dibentuk dapat berupa organisasi internasional, salah satu contohnya adalah organisasi internasional yang menjadi wadah kerjasama berbagai negara di dunia khususnya dalam hal perekonomian yang terletak di kawasan Asia-Pasifik.

Keadaan ekonomi politik setelah perang dingin mendorong berdirinya organisasi internasional yang bernama Asia Pacific Economic Cooperation atau disingkat APEC pada tahun 1989. APEC merupakan organisasi ekonomi internasional atau forum kerja sama ekonomi yang beranggotakan 21 negara di kawasan Asia-Pasifik. Tujuan dari forum ini adalah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, memperkuat komunitas dan juga mempromosikan perdagangan bebas di kawasan Asia-Pasifik. APEC dibuat untuk menanggapi peningkatan interdependensi ekonomi antara negara-negara Asia-Pasifik, pembentukan blok perdagangan di belahan dunia, dan penciptaan pasar baru untuk produk pertanian dan bahan mentah di luar Eropa. Dengan kata lain, APEC pada hakekatnya dibentuk sebagai blok terbuka dengan keanggotaan bersifat sukarela yang memfokuskan perhatiannya pada masalah ekonomi, bukan politik.

Anggota APEC terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Chile, Jepang, Hongkong, Republik Korea, Cina Taiwan, Republik Cina, Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Papua Nugini, Australia dan Selandia Baru. Anggota APEC bekerja sama melalui dialog yang dilakukan pada pertemuan rutin. Kawasan Asia-Pasifik merupakan kawasan yang begitu luas dan beragam, keragaman tersebut menciptakan masalah besar dalam menjalin kerja sama.

APEC adalah bentuk kerja sama regional yang inovatif dan fleksibel yang dirancang untuk mengakomodasi keragaman ekonomi regional tersebut. 21 negara anggota, yang mencakup empat benua, mencakup hampir 50% populasi dunia, 60% PDB global, dan 50% perdagangan internasional. Sebagai kawasan paling dinamis secara ekonomi di dunia, kawasan Asia-Pasifik semakin menjadi pusat gravitasi ekonomi dunia. (Weixing, 2013) Ketimpangan infrastruktur merupakan isu signifikan yang mempengaruhi banyak negara di kawasan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC). Kawasan Asia-Pasifik sendiri merupakan kawasan yang begitu luas dan beragam, dengan perekonomian mereka yang begitu berbeda secara substansial dalam berbagai aspek seperti populasi, budaya, sistem politik, pembangunan ekonomi dan tingkat pendapatan, kekayaan sumber daya alam, serta kebijakan perdagangan. Keberagaman tersebut pun turut dapat menciptakan masalah dalam menemukan penyebut yang sama untuk kerja sama. APEC pun terbentuk sebagai bentuk kerja sama regional yang inovatif dan fleksibel yang dirancang untuk mengakomodasi keragaman ekonomi regional. Seperti halnya bagian-bagian yang membentuk organisme biologis (seperti mata dan tangan) saling terkait dan saling bergantung dalam interaksinya satu sama lain, demikian pula lembaga-lembaga dalam suatu masyarakat (seperti ekonomi dan pemerintahan) berkaitan erat satu sama lain. (So, 1990)

APEC adalah forum beranggotakan 21 negara yang berupaya mempromosikan perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi di seluruh kawasan Asia-Pasifik. Namun, sementara beberapa negara anggota telah mengembangkan sistem infrastruktur yang kuat, yang lain berjuang dengan infrastruktur yang tidak memadai,

yang menghambat kemampuan mereka untuk berpartisipasi penuh dalam perdagangan regional dan pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan infrastruktur di APEC sangat akut di negara-negara kurang berkembang, yang seringkali kekurangan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan akses internet. Kurangnya infrastruktur ini mempersulit perekonomian ini untuk menarik investasi asing dan berpartisipasi penuh dalam rantai nilai global. Akibatnya, mereka sering berjuang untuk bersaing dengan ekonomi yang lebih maju, yang memiliki akses terhadap infrastruktur modern yang memungkinkan mereka menjadi lebih produktif dan efisien.

Mengatasi ketimpangan infrastruktur merupakan isu penting bagi APEC, karena sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengurangi kemiskinan. Dengan berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi anggota dapat membantu menjembatani kesenjangan antara ekonomi yang lebih dan kurang berkembang dan mendorong integrasi dan kerja sama ekonomi yang lebih besar di seluruh kawasan Asia-Pasifik.

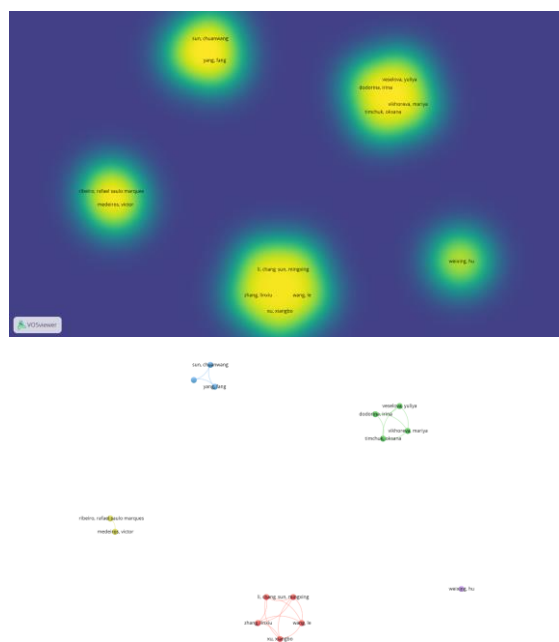
Salah satu contoh ketimpangan infrastruktur di negara APEC adalah Indonesia. Meskipun merupakan salah satu perekonomian terbesar di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam hal pembangunan infrastruktur, khususnya di daerah yang lebih terpencil. Misalnya di pedesaan, akses terhadap infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan transportasi masih terbatas. Kurangnya infrastruktur ini dapat mempersulit petani dan usaha kecil untuk mengakses pasar dan menjangkau pelanggan. Selain itu, infrastruktur transportasi yang tidak memadai dapat mempersulit orang untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, yang semakin memperburuk kesenjangan sosial

dan ekonomi. Dibandingkan dengan daerah-daerah yang maju secara ekonomi, daerah-daerah yang rentan secara ekonomi dan ekologis telah memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap emisi karbon secara historis, tetapi juga merupakan daerah pertama yang menanggung dampak cuaca ekstrem yang disebabkan oleh perubahan iklim, yang semakin memperburuk ketimpangan antara daerah maju dan berkembang dan mengarah ke hilangnya kesejahteraan bagi masyarakat di daerah-daerah tersebut. (Sun et al., 2021)

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mencanangkan beberapa inisiatif yang ditujukan untuk meningkatkan infrastruktur di pedesaan, seperti program “Indonesia Sejahtera” yang berfokus pada peningkatan akses layanan dasar di daerah terpencil. Pemerintah juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang mencakup investasi infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi. Namun, terlepas dari upaya ini, ketimpangan infrastruktur tetap menjadi tantangan besar di Indonesia, dan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua warga memiliki akses ke infrastruktur dasar yang mereka butuhkan untuk berkembang.

Ketika membahas mengenai membahas mengenai pembangunan internasional, beberapa penelitian sebelumnya (So, 1990; Timchuka, 2023) berfokus pada basis dan teori pembangunan internasional. Ada pula beberapa yang fokus pada ketimpangan infrastruktur dalam pembangunan internasional (Yang, 2020; Sun, 2021; Medeiros 2020). Meski begitu, belum ada yang membahas mengenai ketimpangan infrastruktur dalam pembangunan internasional di negara-negara APEC. Kemudian, dalam

membahas mengenai APEC pun (Atiqah, 2017; Lestari, 2021; Weixing, 2009), belum ada yang membahas mengenai ketimpangan infrastruktur yang dialami negara-negara APEC. Konteks yang dibahas meliputi pembangunan internasional, ketimpangan infrastruktur, dan APEC. Namun, belum ada yang menggabungkan ketiganya.



Gambar 1.1. Analisis Co-Authorship dengan VOSviewer

Dalam aspek hubungan antar penulis, terdapat 15 penulis dengan 5 orang yang memiliki kedekatan atas keterhubungan yang terbagi ke dalam 5 klaster. Pada hasil analisis VosViewer tersebut menunjukkan penulis yang paling banyak melakukan kajian riset adalah Chang, Mingxing, Linxiu, Xiangbo, dan Wang. Namun, pada publikasi yang terlihat berwarna biru tosca telah terbit di rentang tahun 2021 dengan judul artikel *Energy Infrastructure Investment and Regional Inequality, Evidence from China's Power Grid*. Analisis ini menunjukkan bahwa kebaruan penelitian dari kelima penulis

tersebut memiliki pengaruh signifikan yang besar terhadap kata kunci ketimpangan infrastruktur, pembangunan internasional, dan APEC.

No	Judul	Penulis	Tahun	Abstrak	Referensi
1	Investment in Energy Infrastructure in the Asia-Pacific Region	Linxiu Wang, Mingxing Chang, Xiangbo Wang, and Linxiu Wang	2021	Yes	Yes
2	Energy Infrastructure Investment and Regional Inequality: Evidence from China's Power Grid	Linxiu Wang, Mingxing Chang, Xiangbo Wang, and Linxiu Wang	2021	Yes	Yes
3	Investment in Energy Infrastructure in the Asia-Pacific Region	Linxiu Wang, Mingxing Chang, Xiangbo Wang, and Linxiu Wang	2021	Yes	Yes
4	Investment in Energy Infrastructure in the Asia-Pacific Region	Linxiu Wang, Mingxing Chang, Xiangbo Wang, and Linxiu Wang	2021	Yes	Yes
5	Investment in Energy Infrastructure in the Asia-Pacific Region	Linxiu Wang, Mingxing Chang, Xiangbo Wang, and Linxiu Wang	2021	Yes	Yes
6	Investment in Energy Infrastructure in the Asia-Pacific Region	Linxiu Wang, Mingxing Chang, Xiangbo Wang, and Linxiu Wang	2021	Yes	Yes
7	Investment in Energy Infrastructure in the Asia-Pacific Region	Linxiu Wang, Mingxing Chang, Xiangbo Wang, and Linxiu Wang	2021	Yes	Yes
8	Investment in Energy Infrastructure in the Asia-Pacific Region	Linxiu Wang, Mingxing Chang, Xiangbo Wang, and Linxiu Wang	2021	Yes	Yes
9	Investment in Energy Infrastructure in the Asia-Pacific Region	Linxiu Wang, Mingxing Chang, Xiangbo Wang, and Linxiu Wang	2021	Yes	Yes
10	Investment in Energy Infrastructure in the Asia-Pacific Region	Linxiu Wang, Mingxing Chang, Xiangbo Wang, and Linxiu Wang	2021	Yes	Yes
11	Investment in Energy Infrastructure in the Asia-Pacific Region	Linxiu Wang, Mingxing Chang, Xiangbo Wang, and Linxiu Wang	2021	Yes	Yes
12	Investment in Energy Infrastructure in the Asia-Pacific Region	Linxiu Wang, Mingxing Chang, Xiangbo Wang, and Linxiu Wang	2021	Yes	Yes
13	Investment in Energy Infrastructure in the Asia-Pacific Region	Linxiu Wang, Mingxing Chang, Xiangbo Wang, and Linxiu Wang	2021	Yes	Yes
14	Investment in Energy Infrastructure in the Asia-Pacific Region	Linxiu Wang, Mingxing Chang, Xiangbo Wang, and Linxiu Wang	2021	Yes	Yes
15	Investment in Energy Infrastructure in the Asia-Pacific Region	Linxiu Wang, Mingxing Chang, Xiangbo Wang, and Linxiu Wang	2021	Yes	Yes



Gambar 1.2. Analisis jurnal artikel dalam ATLAS.ti

Dalam aspek referensi penelitian dengan kata kunci ketimpangan pembangunan infrastruktur internasional di kawasan Asia-Pasifik terdapat beberapa jurnal artikel yang digunakan. karya Atiqah, Lestari, dan Weixing digunakan untuk membahas latar belakang, sejarah, tujuan, peran, dan menjelaskan APEC sebagai Organisasi Internasional. Dalam pembahasan teori-teori pembangunan internasional, digunakan karya So yang berjudul *Social Change and Development. Modernization, Dependency, and World System Theories* yang menjelaskan teori modernisasi, dependensi, dan teori sistem dunia. Kemudian untuk membahas ketimpangan infrastruktur regional menggunakan karya dari Yang, Sun, dan Medeiros yang membahas mengenai adanya ketimpangan energi infrastruktur di berbagai kawasan di Asia-Pasifik.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara anggota APEC dalam mengatasi ketimpangan infrastruktur untuk mencapai pembangunan internasional pasca pandemi Covid-19?

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1. Kerjasama Internasional

Konsep kerjasama internasional sudah ada sejak lama, negara-negara telah mempraktikkan kerja sama internasional jauh sebelum sejarawan membahas diplomasi, perjanjian, dan aliansi lebih dari dua ribu tahun yang lalu. Namun, studi kerja sama internasional sendiri ternyata masih baru. Kerja sama internasional mengalami berkembang pesat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Hal tersebut terjadi karena beberapa alasan, yang pertama adalah munculnya sistem internasional tunggal. Hubungan internasional jarak jauh sudah ada sebelum abad kesembilan belas, tetapi baru pada saat itulah sistem interaksi regional menyatu menjadi satu jaringan planet. Proses konvergensi ini dipicu oleh ekspansi kekaisaran Eropa. Yang terakhir mengeksplor gagasan keseimbangan kekuasaan, kedaulatan teritorial, dan mengatur hubungan diplomatik melalui konferensi multilateral yang mendukung Konser Eropa pasca-Napoleon yang mengikuti Kongres Wina pada tahun 1815.

Titik kritis geopolitik dicapai pada awal abad ke-20, ketika peristiwa-peristiwa di satu bagian dunia dapat memiliki konsekuensi yang hampir seketika di bagian dunia lainnya, seperti pecahnya Perang Dunia Pertama. Perang menempati posisi sentral dalam sejarah kerja sama

internasional. Hal itu sebagian disebabkan oleh pola integrasi internasional sebelum perang, aktor negara mengembangkan bentuk baru kerjasama internasional selama perang itu sendiri, penyelesaian perdamaian pasca perang membentuk kerangka kerja internasional baru untuk kerja sama internasional formal dan informal, dan beragam gerakan transnasional, NGO, dan kampanye sukarela internasional yang dibentuk atau diperluas setelah perang dengan tujuan mendorong kerja sama internasional yang lebih besar sebagai cara untuk mencegah konflik global di masa depan.

Peristiwa penting lainnya dalam sejarah kerjasama internasional terjadi di akhir abad ke-20 dengan berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nation. Tujuan utama dari berdirinya PBB adalah untuk menjaga perdamaian dan kedamaian dunia serta mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia dengan membina jalannya kerjasama internasional di berbagai bidang. Berdirinya PBB ini menjadi tolak ukur bagi negara-negara untuk melakukan kerjasama internasional serta berkembangnya organisasi internasional lainnya.

Konsep kerjasama sudah dipahami sejak awal 1980-an dengan bukunya Robert Axelrod pada tahun 1984 "The Evolution of Cooperation" sebagai perilaku terkoordinasi dari aktor independen dan mungkin egois yang menguntungkan mereka semua. Dimana keegoisan dari aktor tidak perlu menghalangi kerja sama dalam situasi saling ketergantungan di mana kesejahteraan satu individu bergantung pada perilaku orang lain. Definisi kerja sama internasional ini bersifat umum baik dari segi aktor maupun isu. Kerja sama terjadi tidak hanya di antara individu tetapi juga di antara entitas kolektif, termasuk perusahaan, partai

politik, organisasi etnis, kelompok teroris, dan negara-bangsa.

Kemudian menurut K. J. Holsti (1988), kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai bentuk pandangan tentang bagaimana masing-masing pihak yang melakukan kerjasama mempromosikan dan mengimplementasikan dua atau lebih manfaat, nilai atau tujuan, yang dihasilkan dengan adanya interaksi. Kesepakatan atau masalah tertentu antara dua negara atau lebih untuk memanfaatkan kepentingan bersama atau kepentingan yang bertentangan. Holsti menambahkan bahwa terdapat beberapa faktor pendorong negara untuk menjalin hubungan kerjasama dengan negara lainnya. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi banyak negara yang bekerjasama dengan negara lain untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan negara tersebut dalam produksi barang yang dibutuhkan oleh rakyatnya akibat batasan-batasan yang dimiliki negara tersebut, efisiensi pengurangan biaya pengeluaran negara, ancaman keamanan bersama, dan mengurangi kerugian yang disebabkan oleh tindakan masing-masing negara yang dapat mempengaruhi negara lain.

Menurut Dougherty dan Pfaltzgraff (1997), kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian hubungan yang tidak didasarkan pada paksaan atau dengan menggunakan kekerasan dan dilegitimasi oleh hukum, seperti dalam suatu organisasi internasional seperti PBB atau APEC. Aktor negara menciptakan hubungan kerja sama melalui organisasi dan sistem internasional yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan, peraturan, norma, dan proses pengambilan keputusan yang disepakati dimana harapan para aktor dan kepentingan negara bertemu dalam hubungan internasional. Kerja sama

dapat tumbuh dari komitmen individu terhadap kebaikan bersama atau upaya mewujudkan kepentingan pribadi. Kunci perilaku kerjasama adalah sejauh mana setiap individu percaya bahwa yang lain akan bekerjasama. Inti dari teori kerjasama, kemudian, bertumpu pada realisasi kepentingan pribadi, di mana hasil yang saling menguntungkan dapat dicapai melalui kerjasama daripada dengan persaingan.

Kerjasama internasional biasanya terjadi dalam situasi desentralisasi dimana tidak ada lembaga dan standar yang efektif untuk entitas yang terpisah secara budaya dan geografis, sehingga untuk mengatasi suatu masalah, perlu pemahaman atas motivasi dan tujuan dari berbagai pihak yang terlibat. Interaksi berkelanjutan, perkembangan komunikasi dan transportasi antar negara dalam bentuk pertukaran informasi tentang tujuan kerjasama dan pertumbuhan berbagai institusi, meskipun tidak sempurna, dimana pola kerjasama menggambarkan unsur-unsur dalam teori kerjasama yang didasarkan pada kepentingan pribadi di sistem internasional yang anarkis.

Mekanisme tradisional kerja sama internasional adalah kerja sama antar pemerintah dan antar negara dimana pengimplementasian kerjasama tersebut melalui pembuatan kebijakan domestik di dalam negara. Mekanisme kerja sama internasional sendiri terdapat beberapa bentuk, yaitu meliputi perjanjian bilateral, regional, dan multilateral. Kerjasama internasional secara teoritis melibatkan hubungan antara dua negara atau hubungan antara entitas yang lebih besar, yang disebut juga sebagai multilateralisme. Meskipun kerjasama sering dimulai dengan hubungan antara dua negara, fokus kerjasama internasional adalah kerjasama multilateral. John Ruggie mendefinisikan multilateralisme sebagai suatu bentuk

institusional yang mengatur hubungan antara tiga negara atau lebih berdasarkan prinsip-prinsip perilaku yang diterima secara umum yang dinyatakan dalam berbagai institusi, termasuk organisasi internasional, sistem internasional, dan fenomena yang belum terjadi, yaitu tatanan internasional.

Perilaku kerjasama dapat terjadi dalam situasi kelembagaan formal dengan aturan yang disepakati, norma yang disepakati, norma yang diterima, dan proses pengambilan keputusan secara umum. Teori kerjasama internasional sebagai dasar utama dari kebutuhan akan pengertian dan kesepakatan pembangunan politik mengenai dasar susunan internasional dimana perilaku muncul dan berkembang. Melalui multilateralisme dari organisasi internasional, rezim internasional, dan aktor internasional meletakkan konsep masyarakat politik dan proses integrasi dimana terciptanya suatu kesatuan.

2.2. Pembangunan Internasional

Konsep hubungan internasional merupakan sebuah hal yang telah hadir selama ribuan tahun, yang mana setelahnya pun terlahir pula konsep pembangunan internasional, mengikuti sebagai suatu gagasan baru yang terpisah. Konsep pembangunan internasional terlahir dengan sifat teknokratis yang berakar pada pemikiran politik modern pasca Perang Dunia Kedua. Era pasca Perang Dunia Kedua seringkali dinyatakan sebagai era pembangunan, yang mana era ini terbentuk berdasarkan kebutuhan rekonstruksi pasca Perang Dunia Kedua, tindakan untuk melaksanakan evolusi dari era kolonialisme menjadi globalisasi dan pembentukan kebijakan perdagangan bebas dalam lingkup global, dan juga dimulainya Perang

Dingin serta keinginan Amerika Serikat untuk mencegah dunia hanyut ke dalam alur komunisme.

Konsep pembangunan internasional sendiri dapat diarahkan dan terkait erat terhadap negara-negara yang memperoleh kemerdekaan pasca kolonialisme, yang mana perkembangan negara-negara tersebut harus segera dibangun untuk menopang keberadaan dan kesejahteraan negara tersebut juga keberlangsungan hidup penduduknya. Amerika Serikat merupakan pihak yang melakukan tindakan pertama dengan mengambil peran penting dalam pembentukan Bank Internasional dalam aspek Rekonstruksi dan Pembangunan (sekarang menjadi bagian Bank Dunia) dan Dana Moneter Internasional (IMF), yang mana keduanya didirikan di tahun 1944, dan kemudian diikuti oleh PBB di tahun 1945.

Pembangunan internasional sendiri merupakan sebuah konsep luas yang mempunyai gagasan bahwa masyarakat dalam lingkup global memiliki perkembangan yang beragam di berbagai skala. Konsep ini merupakan suatu klasifikasi tingkat internasional untuk membagi dan mengelompokkan negara-negara global ke dalam tingkat negara maju, semi berkembang, dan berkembang, berdasarkan standar dan penilaian yang ada. Pembangunan internasional tak hanya merujuk pada perubahan dasar “pembangunan” yang ada dan berjalan seiring waktu, tapi juga bidang-bidang lain yang terkait dengan praktik, industri, komunikasi, dan lain-lain. Hal ini terkait dengan konsep pembangunan internasional yang tak hanya meringankan suatu masalah, tapi juga mencari solusi jangka panjang dan mempertahankan tujuan yang ingin dicapai, di mana hal ini tidak akan berhenti dan akan terus berlanjut tanpa batasan selama negara tersebut ada. Hal ini umumnya hadir berdasarkan isu-isu yang

ada dan tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi isu-isu tersebut, yang mana isu-isu tersebut tentu juga akan kerap hadir dan berkembang seiring berjalannya waktu.

Penilaian pembangunan internasional mengenai negara maju, semi berkembang, dan berkembang mempunyai berbagai standar yang beragam dan terkadang juga dapat cenderung bersifat subjektif, atau bahkan menimbulkan kontroversi. Meski begitu, hal-hal yang dinilai cenderung penting untuk menentukan tingkat negara tersebut antara lain adalah hal-hal pokok seperti PDB Nasional, Angka Harapan Hidup, Indeks Pembangunan Manusia, koefisien Gini, Pendapatan per-kapita, Angka melek huruf, Indeks Keamanan Manusia, dan banyak lainnya yang dinilai sebagai hal krusial untuk menentukan tingkat pembangunan internasional sebuah negara.

Meski begitu, terdapat banyak pemahaman mengenai jenis dan tingkat pembangunan suatu negara. Pembangunan internasional sering dikaitkan secara komprehensif dan multidisiplin dengan pembangunan manusia dan daya saing, kualitas hidup, atau kesejahteraan subjektif. Pembangunan internasional juga dapat dikatakan sebagai bidang studi di garis depan urusan internasional, dikarenakan hal ini mengeksplorasi pertanyaan tentang kemiskinan, ketidaksetaraan, tatanan sosial, dan keadilan global, untuk membuat orang memahami berbagai proses politik, ekonomi, dan hukum yang membentuk pembangunan. di bidang internasional. Bidang studi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kritis tentang isu-isu dalam pembangunan dan menyediakan instrumen praktis untuk keterlibatan di masa depan. Pembangunan internasional mempertimbangkan isu-isu teoretis, praktis dan etis dengan menginterogasi wacana pembangunan,

tujuan dan efeknya, dan dengan berusaha memahami bentuk-bentuk inklusi dan eksklusif serta intervensi dalam masyarakat.

2.3. Dependency Theory

Dalam Ekonomi Politik Internasional, ada perspektif teoretis yang bersaing mengenai pertanyaan tentang ketidaksetaraan global dan pembagian Utara-Selatan. Salah satu perspektif teoretis yang bersaing adalah Teori Dependensi, yang muncul pada 1950-an sebagai tanggapan terhadap teori modernisasi. Teori ini pada awalnya merupakan kritik terhadap anggapan di masa awal perang dingin yang mengkonsepikan pembangunan ekonomi akan menguntungkan setiap negara yang tergabung dalam sistem internasional. Namun pada kenyataannya kesejahteraan ekonomi di suatu negara dapat menyebabkan permasalahan keterbelakangan di negara lain. Teori Dependensi menjadi terkenal di tahun 1960-an dan 70-an.

Dasar dari Teori Dependensi dibangun melalui pendapat para ahli ekonomi yang berasal dari ECLA salah satunya yang paling berpengaruh adalah Raul Prebisch. Mereka berusaha untuk menjelaskan ketertinggalan perekonomian Amerika Latin dan mendapati bahwa hal ini disebabkan oleh ketidakadilan yang terjadi dalam kegiatan perdagangan antara pengekspor barang mentah dengan pengekspor barang manufaktur. Proposal Prebisch dan ECLAC yang menjadi dasar awal bagi kelahiran teori dependensi pada perkembangannya juga dikritik karena dinilai gagal menghasilkan model dependensi oleh para ahli ekonomi lain yang juga kemudian ikut mengembangkan teori ini yakni Falleto dan Dos Santos. Setiap ahli tersebut meskipun menganut teori yang sama tetapi menghasilkan

perspektif yang berbeda-beda dalam menjawab kondisi kemiskinan di negara dunia ketiga karena menggunakan pendekatan yang berbeda.

Teori Dependensi adalah aliran pemikiran yang muncul pada tahun 1950-an dan 1960-an sebagai kritik terhadap teori modernisasi. Teori tersebut berpendapat bahwa keterbelakangan negara-negara di *Global South* adalah akibat dari ketergantungan ekonomi dan politik mereka pada negara-negara yang lebih maju di *Global North*. Teori Dependensi dikembangkan oleh beberapa pencetus, dan pandangan mereka tentang teori ini agak berbeda. Berikut adalah gambaran umum teori menurut masing-masing pencetusnya:

1. Raúl Prebisch: Prebisch adalah seorang ekonom Argentina dan direktur pendiri Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin dan Karibia. Dia berpendapat bahwa ekonomi global terbagi menjadi inti negara maju dan pinggiran negara terbelakang. Dia berargumen bahwa pinggiran bergantung pada inti untuk teknologi, modal, dan akses ke pasar, dan ketergantungan ini melanggengkan keterbelakangan di pinggiran.
2. Andre Gunder Frank: Frank adalah seorang sosiolog dan ekonom Jerman-Amerika. Dia mengembangkan karya Prebisch dengan berargumen bahwa keterbelakangan bukanlah keadaan sementara, tetapi fitur permanen dari ekonomi global. Dia berargumen bahwa hubungan *core-periphery* adalah bentuk eksploitasi, di mana inti mengekstraksi sumber daya dari pinggiran untuk mendorong pertumbuhannya sendiri. Dia menyebut proses ini

"ketergantungan", dan berargumen bahwa itu hanya dapat diatasi dengan melepaskan diri dari sistem kapitalis global.

3. Fernando Henrique Cardoso: Cardoso adalah seorang sosiolog dan ekonom Brasil yang kemudian menjadi presiden Brasil. Dia berargumen bahwa ketergantungan bukan hanya fenomena ekonomi, tetapi juga politik. Dia melihat hubungan antara inti dan pinggiran sebagai salah satu dominasi dan ketundukan, di mana pinggiran tidak hanya bergantung secara ekonomi pada inti, tetapi juga secara politis tunduk padanya. Dia berargumen bahwa satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari hubungan ini adalah melalui reformasi demokrasi dan penciptaan tatanan global yang lebih setara.
4. Samir Amin: Amin adalah seorang ekonom dan ilmuwan politik Mesir-Prancis. Dia berargumen bahwa ketergantungan adalah ciri struktural ekonomi global, dan hal itu tidak dapat diatasi hanya dengan meningkatkan perdagangan atau investasi di pinggiran. Dia berargumen bahwa satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari ketergantungan adalah melalui revolusi sosialis dan penciptaan tatanan global baru yang non-kapitalis.

Terlepas dari pentingnya dalam membentuk cara kita berpikir tentang ekonomi global, Teori Dependensi telah dikritik. Beberapa kritikus berpendapat bahwa hal itu terlalu menyederhanakan hubungan kompleks antara negara dan mengabaikan keragaman kondisi ekonomi, politik, dan sosial di *Global South*. Yang

lain berpendapat bahwa itu gagal untuk memperhitungkan agensi dan kreativitas orang-orang di *Global South*, yang bukan sekadar korban pasif dari sistem ekonomi global.

Meskipun demikian, Teori Dependensi tetap menjadi perspektif yang berpengaruh dan penting untuk memahami ekonomi global dan hubungan antara negara inti dan negara pinggiran. Ini menyoroti ketidaksetaraan yang mendalam dan ketidakseimbangan kekuatan yang mendukung sistem ekonomi global, dan menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial yang sebenarnya di *Global South* hanya dapat dicapai dengan menantang dan mengubah sistem ini. Secara keseluruhan, Teori Dependensi merupakan kritik terhadap teori modernisasi dan upaya untuk menjelaskan mengapa beberapa negara tetap terbelakang meskipun ada upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka.

Teori Dependensi diaplikasikan sebagai suatu pendekatan untuk memahami fenomena keterbelakangan serta ketergantungan dalam hal ekonomi yang ditekankan sebagai efek dari sistem politik dan ekonomi global. Teori Dependensi mempunyai beberapa poin dalam bentuk model yang dibentuk oleh Raúl Prebisch, yang mana hal ini dikemukakan dalam bentuk urutan yang diyakini diperlukan untuk membangun aspek perkembangan dari suatu negara. Poin-poin tersebut antara lain:

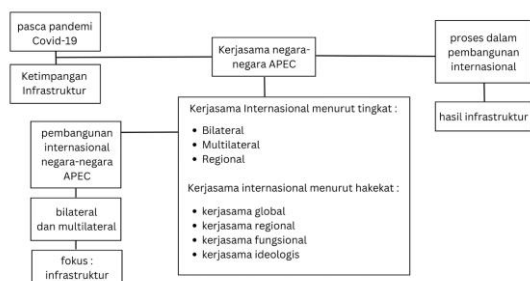
- a. Dalam mengendalikan nilai tukar moneter, maka lebih ditekankan pada kebijakan fiskal dibanding kebijakan moneter.
- b. Tingkatkan peran pemerintah yang lebih efektif dalam aspek pembangunan nasional.
- c. Ciptakan platform investasi untuk memberikan peran istimewa kepada ibu kota negara.
- d. Izinkan masuknya modal eksternal yang akan mengikuti serta membantu prioritas yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan nasional.
- e. Promosikan permintaan internal yang lebih efektif dalam hal pasar domestik sebagai basis untuk memperkuat proses industrialisasi di Amerika Latin.
- f. Hasilkan permintaan internal yang lebih besar dengan meningkatkan upah dan gaji para pekerja, yang dimana akan memberikan efek positif dengan mempengaruhi permintaan agregat di pasar internal.
- g. Kembangkan cakupan pelayanan sosial pemerintah yang lebih efektif, terutama kepada sektor-sektor miskin agar dapat menciptakan peluang bagi sektor-sektor tersebut untuk menjadi lebih berdaya saing.
- h. Kembangkan strategi nasional sesuai dengan model substitusi impor, lindungi produksi nasional dengan menetapkan kuota dan tarif di pasar eksternal.

Teori ini menyatakan bahwa penyebab utama dari keterbelakangan adalah posisi negara-negara periferi yang terdampak secara besar dalam lingkup ekonomi dunia. Andre Gunder Frank membagi struktur dunia menjadi negara-negara tingkat core dan negara-negara tingkat periferi dalam sebuah sistem kapitalis. Interaksi dan hubungan yang dimiliki oleh negara core dan negara periferi merupakan sebuah kontrol absolut, dengan peran negara core yang melakukan monopoli besar-besaran dalam pasar

ekonomi dan perdagangan terhadap negara periferi.

Hal ini umumnya disebabkan oleh negara-negara periferi yang tak memiliki banyak pilihan dan kemudian secara murah menawarkan tenaga kerja serta material mentah di dalam pasar dunia. Hal-hal tersebut kemudian didapatkan oleh negara-negara core, yang juga memiliki sistem ekonomi jauh lebih berkembang sehingga mampu mengolahnya menjadi produk selesai. Kemudian, di sisi lain, negara-negara periferi pun berakhir membeli produk-produk selesai tersebut dengan harga yang tinggi, menggunakan modal yang kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produktif negara tersebut. Hasilnya ialah suatu lingkaran setan yang melanggengkan pemisahan ekonomi dunia antara core dan periferi. Fernando Henrique Cardoso, menganggap bahwa terdapat kemungkinan untuk terjadi beberapa tingkat perkembangan dalam sistem dependensi. Di sisi lain, Andre Gunder Frank, menyatakan bahwa satu-satunya jalan keluar dari dependensi adalah melalui penciptaan ekonomi nasional (sosialis) non-kapitalis.

2.4 Kerangka Pemikiran



Melalui kerangka pemikiran di atas, peneliti menggambarkan pola pemikiran dalam variabel-variabel yang ada, yakni kerjasama negara-negara APEC sebagai

variabel dependen, ketimpangan infrastruktur sebagai variabel independen, dan pasca pandemi Covid-19 sebagai variabel intervening. Konsep kerjasama sendiri dapat dibagi menjadi berbagai tingkat, yakni bilateral yang dilakukan oleh dua negara, multilateral yang dilakukan berbagai negara, dan regional yang dilakukan oleh negara-negara yang tercakup dalam sebuah kawasan. Kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara APEC adalah hal yang dilakukan oleh negara-negara yang termasuk dalam APEC, dengan mayoritas Asia Pasifik. Dalam kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara APEC tersebut, terdapat kerjasama bilateral dan regional. Kerjasama yang dilakukan tersebut memiliki fokus pada pembangunan infrastruktur negara-negara APEC.

3. Metode Penelitian

3.1. Desain Penelitian

Demi mencapai titik jawaban dari pertanyaan rumusan masalah, maka penelitian ini akan ditempuh dengan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif dipilih mengingat metode ini merupakan metode yang paling umum digunakan oleh para penstudi Hubungan Internasional. Pertimbangan dalam memilih metode ini pun tidak terlepas dari ketepatan cara yang diinginkan untuk mencapai jawaban dari pertanyaan rumusan masalah. Metode penelitian kualitatif adalah langkah-langkah penelitian yang dalam menjelaskan isinya digunakan data bersifat deskriptif dengan narasi atau lisan objek penelitian (Fitrah & Luthfiyah, 2017).

Metode ini dipilih ketika jika tujuan yang ingin diraih adalah melihat serta menjelaskan suatu keadaan/fenomena

ataupun suatu objek yang dalam konteksnya nanti akan ditemukan makna atau pemahaman komprehensif tentang masalah yang ada, yang tentunya faktual dalam bentuk data kualitatif, bagaimanapun wujudnya (Yusuf, 2014). Tentunya, penelitian ini dilaksanakan tanpa melupakan kaidah lingkungan alamiah sehingga apa yang dipaparkan merupakan kondisi asli tanpa adanya rekayasa. Ditempuhnya cara analisis deskriptif dalam metode kualitatif ini didukung oleh tinjauan pustaka dari bacaan terdahulu serta teori yang mendukung. Dengan demikian, data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti jurnal, laporan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di negara-negara anggota APEC. Selanjutnya, data ini dianalisis melalui pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi isu ketimpangan pembangunan infrastruktur di negara-negara anggota APEC.

3.2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dengan sumber data berupa literatur dalam bentuk elektronik seperti artikel, jurnal penelitian terdahulu, dan sumber-sumber lainnya yang dapat mendukung penelitian ini serta yang memiliki kaitan dengan tujuan dan objek penulisan mengenai ketimpangan infrastruktur yang ada di kawasan Asia-Pasifik.

3.3. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Penelitian ini akan memperoleh data yang diinginkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder berbentuk studi literatur berbasis *internet-based research*. Studi literatur, sebagai

sumber data yang sekunder, merupakan teknik pengumpulan data dengan menganalisa buku, arsip, catatan, jurnal, laporan, dan lain sebagainya yang terkait dengan objek penelitian yang ada. Pengumpulan data ini dilakukan dengan metode *internet-based research*. *Internet-based research* merupakan pencarian data yang dilakukan melalui media internet dengan menelusuri situs resmi, portal berita, jurnal serta dokumen *online*, dan lain-lain.

Penelitian ini memiliki beberapa instrumen penelitian yang digunakan demi memperoleh data yang akurat untuk mencapai tujuan penelitian dan hasil yang diharapkan. Instrumen yang digunakan salah satunya adalah peneliti, sebagai instrumen yang berperan membentuk topik dan mencari data yang valid serta dibutuhkan untuk mencapai hasil. Kemudian terdapat pula instrumen laptop dan smartphone sebagai media yang digunakan untuk melakukan *internet-based research* dalam menemukan data-data terkait topik yang tersedia di internet. Instrumen yang lainnya ialah aplikasi *vosviewer* untuk membangun visualisasi data biometrik terkait jurnal-jurnal dan buku-buku yang ingin digunakan untuk mencari yang sekiranya paling akurat, *atlas.ti* untuk mengorganisir data-data penting yang ada dalam jurnal-jurnal dan buku-buku yang telah dipilih, dan *mendeley* untuk membuat referensi jurnal-jurnal dan buku-buku yang digunakan dalam penelitian.

3.4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data dianalisis secara kualitatif melalui metode analisis isi (*content analysis*) yang digunakan untuk mengekstrak dan menganalisis data kualitatif dari berbagai sumber, seperti laporan dan dokumen terkait topik

penelitian. Berikutnya, untuk menjamin mutu dan keaslian data, akan dilakukan triangulasi data. Selain itu, data yang bersifat kualitatif akan diolah menggunakan *software* Atlas.ti.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Inisiatif APEC dan Rencana Awal Pembangunan

Dalam pandemi Covid-19 ini, organisasi-organisasi internasional baik global maupun regional menjadi sebuah wadah bagi negara-negara untuk melakukan kerjasama dalam mengatasi dampak yang dibawa oleh pandemi Covid-19 tersebut. APEC atau Asia-Pacific Economic Cooperation sebagai salah satu organisasi yang bergerak dibidang ekonomi dan perdagangan memiliki kebijakannya sendiri dalam menghadapi pandemi Covid-19. APEC telah menerapkan sejumlah inisiatif pemulihan ekonomi dengan respons yang cepat dalam menanggapi pandemi Covid-19. Inisiatif ini mencakup komitmen tinggi dari negara anggota, analisis dan saran dari ahli, serta inovasi dan proyek yang praktis dalam kerjasama negara APEC.

Pada pertemuan Pemimpin anggota APEC di KTT tahun 2020, menghasilkan APEC Putrajaya Vision 2040. APEC Putrajaya Vision 2040 menjadi satu set prioritas untuk APEC untuk dua puluh tahun ke depan sebagai landasan kerjasama APEC. Visi kawasan Asia-Pasifik adalah untuk menciptakan komunitas Asia-Pasifik yang terbuka, dinamis, tangguh, dan damai pada tahun 2040, untuk kemakmuran semua rakyat dan generasi mendatang. APEC Putrajaya Vision 2040 akan dicapai melalui tiga penggerak ekonomi: perdagangan dan investasi; inovasi dan digitalisasi; dan pertumbuhan yang kuat,

seimbang, aman, berkelanjutan dan inklusif. Dimana APEC akan terus bekerja sama untuk menghadirkan lingkungan perdagangan dan investasi yang bebas, terbuka, adil, tidak diskriminatif, transparan, dan dapat diprediksi. Untuk berpartisipasi dan tumbuh dalam ekonomi global yang saling terhubung, APEC akan mengembangkan lingkungan pendukung yang, antara lain, digerakkan oleh pasar dan didukung oleh ekonomi digital dan inovasi. Selain itu, Untuk memastikan bahwa kawasan Asia-Pasifik tahan terhadap krisis, pandemi, dan keadaan darurat lainnya, APEC akan mendorong pertumbuhan berkualitas yang memberikan manfaat nyata serta kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi semua masyarakat.

APEC Putrajaya Vision menjadi penting dalam menangani pasca pandemi Covid-19, dimana fasilitasi investasi yang efisien dapat membantu lembaga promosi investasi untuk membawa investasi ke area pertumbuhan baru seperti teknologi digital, ekonomi sirkuler, teknologi komunikasi, e-commerce, dan pertanian di kawasan Asia-Pasifik. Negara dapat memanfaatkan Foreign Direct Investment (FDI) untuk pemulihan ekonomi yang kuat akibat Covid-19 dengan menghindari kebijakan proteksionis, memanfaatkan peluang baru dari perubahan FDI dan tren rantai pasokan, serta mendorong kerja sama global. Mengingat APEC juga telah mengadopsi Rencana Aksi Fasilitasi Investasi APEC pada tahun 2008, yang selanjutnya ditingkatkan dalam Deklarasi Kuala Lumpur dan Visi Putrajaya 2040.

Pada tahun 2021, APEC mengembangkan Aotearoa Plan of Action yang merupakan sebuah rencana untuk mengimplementasikan Putrajaya Vision 2040. Dalam mengimplementasikan Visi Putrajaya 2040, ekonomi akan dibangun di dasarkan dokumen pendirian APEC, termasuk Tujuan Bogor 1994 dan Osaka

Action Agenda 1995. Rencana Aksi Aotearoa menetapkan tindakan individu dan kolektif untuk mencapai Visi APEC. Ekonomi APEC akan meninjau dan mengadaptasi Rencana Aksi Aotearoa dari waktu ke waktu untuk memastikannya tetap komprehensif, seimbang, dan relevan di semua elemen Visi Putrajaya. Dimana hal ini dimaksudkan untuk menjadi “dokumen hidup”. Rencana Aksi Aotearoa tidak menghalangi pekerjaan APEC lainnya untuk mengimplementasikan Visi APEC Putrajaya 2040.

4.2. The Experience Exchange, Koneksi, dan Aliansi

Pertukaran pengalaman yang terjadi di negara-negara APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) mengacu pada saling berbagi pengetahuan, *best practice*, dan pembelajaran antar anggota ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. APEC adalah forum ekonomi regional yang terdiri dari 21 negara anggota, termasuk Amerika Serikat, Cina, Jepang, Australia, Kanada, dan banyak lainnya.

Tujuan utama APEC adalah untuk mempromosikan perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka di kawasan Asia-Pasifik. Salah satu cara APEC mencapai tujuan ini adalah melalui pertukaran pengalaman dan informasi antar negara anggota. Pertukaran ini terjadi melalui berbagai mekanisme, termasuk pertemuan, konferensi, seminar, lokakarya, dan kelompok kerja. Ekonomi anggota APEC mengakui manfaat belajar dari pengalaman satu sama lain di berbagai bidang seperti pembangunan ekonomi, fasilitasi perdagangan, akses pasar, peraturan bisnis, teknologi, inovasi, pembangunan berkelanjutan, dan banyak lagi. Dengan berbagi keahlian, kisah sukses, dan tantangan mereka, ekonomi anggota dapat memperoleh wawasan

tentang kebijakan, strategi, dan pendekatan yang efektif yang telah berhasil di negara lain.

Pertukaran pengalaman di negara-negara APEC membantu memfasilitasi kerjasama ekonomi dan integrasi regional. Ini memungkinkan ekonomi untuk belajar dari keberhasilan dan kegagalan negara lain, membantu mereka membuat keputusan berdasarkan informasi dan mengadopsi kebijakan yang lebih selaras dengan tren regional dan global. Proses saling belajar dan kolaborasi ini berkontribusi pada pertumbuhan, stabilitas, dan kemakmuran ekonomi secara keseluruhan di kawasan Asia-Pasifik. Selain pertemuan dan acara formal, APEC juga mendorong interaksi informal dan jaringan antar negara anggota. Pertukaran pengalaman informal sering terjadi selama diskusi bilateral atau multilateral di sela-sela pertemuan APEC. Interaksi ini memberikan kesempatan bagi pembuat kebijakan, pakar, pemimpin bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya untuk terlibat dalam dialog, membangun hubungan, dan berbagi pengetahuan dan wawasan.

Koneksi dan aliansi di APEC terbentuk melalui berbagai aksi, aktivitas, dan inisiatif yang mendorong kerja sama dan kolaborasi antar negara anggota. Tindakan ini berkontribusi untuk meningkatkan integrasi ekonomi, fasilitasi perdagangan, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan ini.

Ekonomi anggota APEC bekerja menuju pembentukan perjanjian regional yang mempromosikan liberalisasi perdagangan dan investasi. Kesepakatan tersebut bertujuan untuk mengurangi hambatan, harmonisasi regulasi, dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Contoh penting termasuk *Asia-Pacific Trade Agreement (APTA)* dan *Comprehensive and Progressive*

Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), yang meningkatkan hubungan ekonomi dan memfasilitasi perdagangan di antara negara-negara yang berpartisipasi. Juga APEC mempromosikan integrasi ekonomi regional melalui inisiatif seperti *Free Trade Area of the Asia-Pacific* (FTAAP). FTAAP bertujuan untuk menciptakan pasar regional yang mulus dan terintegrasi dengan menyelaraskan peraturan dan regulasi perdagangan dan investasi. Dengan membina hubungan ekonomi yang lebih erat, inisiatif ini memperkuat koneksi dan aliansi di antara anggota ekonomi APEC.

APEC mengakui pentingnya konektivitas fisik dan digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonomi anggota berkolaborasi dalam proyek pengembangan infrastruktur, seperti jaringan transportasi, jaringan energi, dan sistem telekomunikasi. Inisiatif ini mempromosikan konektivitas, memfasilitasi perdagangan dan investasi, dan memperkuat ikatan dan aliansi ekonomi di kawasan ini. Dan APEC mendorong kemitraan publik-swasta untuk memanfaatkan sumber daya, keahlian, dan teknologi demi keuntungan bersama. Perekonomian anggota berkolaborasi dalam proyek dan inisiatif bersama, di mana sektor publik dan swasta bekerja sama untuk mengatasi tantangan bersama dan mendorong pembangunan ekonomi. *Public-Private Partnerships* (PPPs) memupuk hubungan dan aliansi yang lebih erat antara pemerintah, bisnis, dan organisasi masyarakat sipil.

APEC menyediakan platform untuk jaringan bisnis, kerja sama, dan keterlibatan. *APEC Business Advisory Council* (ABAC) berfungsi sebagai jembatan antara sektor swasta dan pembuat kebijakan, memberikan rekomendasi dan mengadvokasi kepentingan bisnis. APEC juga menyelenggarakan forum bisnis,

konferensi, dan pameran yang memfasilitasi interaksi bisnis-ke-bisnis dan pembentukan aliansi dan kemitraan. APEC mengakui pentingnya hubungan orang-ke-orang dalam membina kerja sama dan pengertian. Pertukaran budaya, kolaborasi akademik, dan program kepemudaan diselenggarakan untuk mempromosikan dialog dan membangun hubungan antar individu dan institusi. Koneksi ini berkontribusi pada pembentukan aliansi dan memperkuat tatanan sosial dan budaya di wilayah tersebut.

Ekonomi anggota APEC berkolaborasi dalam inisiatif pembangunan berkelanjutan, berbagi pengalaman, dan praktik terbaik. Inisiatif ini mencakup bidang-bidang seperti perlindungan lingkungan, mitigasi perubahan iklim, energi terbarukan, dan pertumbuhan inklusif. Dengan bekerja bersama, ekonomi anggota membangun aliansi dan kemitraan yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi tantangan bersama. APEC memfasilitasi pembangunan kapasitas dan program bantuan teknis di antara anggota ekonomi. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan di berbagai bidang, seperti fasilitasi perdagangan, e-commerce, dan inovasi. Melalui pertukaran pengalaman dan keahlian, ekonomi anggota APEC memperkuat hubungan mereka, mempromosikan pembelajaran, dan membina aliansi yang lebih erat.

Koneksi dan aliansi di APEC dibangun melalui tindakan dan kegiatan yang mempromosikan perjanjian perdagangan dan investasi, integrasi ekonomi regional, konektivitas, kemitraan publik-swasta, kerja sama bisnis, pertukaran orang-ke-orang, kolaborasi pembangunan berkelanjutan, peningkatan kapasitas, dan bantuan teknis. Upaya ini berkontribusi dalam mendorong integrasi

ekonomi, meningkatkan kerja sama, dan mendorong kemakmuran di kawasan Asia-Pasifik.

4.3. Belt Road Initiative

Salah satu kerjasama negara-negara APEC di dalam bidang pembangunan infrastruktur yang terlihat dengan jelas pasca pandemi ialah program Belt and Road Initiative. Belt and Road Initiative (BRI atau B&R), dikenal di Cina sebagai One Belt One Road (OBOR), adalah strategi pembangunan infrastruktur global oleh pemerintah Cina yang muncul pada 2013 dengan tujuan untuk berinvestasi dalam lebih dari 150 negara dan organisasi internasional. Pada Januari 2023, 151 negara telah terdaftar dalam program infrastruktur BRI. Negara-negara yang berpartisipasi mencakup hampir 75% populasi dunia dan menyumbang lebih dari setengah PDB dunia. BRI terdiri dari Silk Road Economic Belt dan 21st Century Maritime Silk Road, yang mana istilah “Belt” (Sabuk) sendiri merupakan kependekan dari “Silk Road Economic Belt” (Sabuk Sutra Jalur Ekonomi) serta mengacu terhadap rute darat yang diusulkan untuk transportasi jalan raya dan kereta api melalui daratan terkurung Asia Tengah di sepanjang rute perdagangan bersejarah yang terkenal di Wilayah Barat, dan istilah “Road” (Jalur) ialah kependekan dari “21st Century Maritime Silk Road” (Jalur Sutra Maritim Abad 21) yang mana mengacu pada jalur laut Indo-Pasifik melalui Asia Tenggara ke Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika. Investasi yang hadir dalam infrastruktur Belt and Road Initiative antara lain termasuk pelabuhan, gedung pencakar langit, rel kereta api, jalan raya, jembatan, bandara, bendungan,

pembangkit listrik tenaga batu bara, dan terowongan rel kereta api.

Inisiatif BRI dimasukkan ke dalam Constitution of China (Konstitusi Cina) pada tahun 2018. Xi Jinping menyebut inisiatif tersebut sebagai “upaya untuk meningkatkan konektivitas regional dan merangkul masa depan yang lebih cerah”. Program BRI sendiri mempunyai target penyelesaian pada tahun 2049, yang mana hal ini akan bertepatan dengan peringatan 100 tahun berdirinya Republik Rakyat Cina (RRC). Tujuan utama di balik pembentukan infrastruktur BRI mempunyai banyak kepentingan. Dalam buku ‘The Governance of China’ (2014), Xi Jinping menyusun pidato beliau di dalam suatu bab yang didedikasikan untuk Belt and Road Initiative. Pidato Xi yang diumumkan di Universitas Nazarbayev, Astana, Kazakhstan pada 8 November 2014 menyatakan tentang uraian beliau mengenai lima kepentingan utama di dalam BRI, yakni fokus pembangunan di negara-negara Asia, perkembangan kerangka dasar atau rencana induk terkait konektivitas Asia dengan memanfaatkan jalur ekonomi, membangun konektivitas Asia dengan membuat terobosan pada infrastruktur transportasi, menerobos kendala di konektivitas Asia dengan membangun platform keuangan, serta kehadiran fondasi konektivitas sosial Asia melalui promosi interaksi satu pihak ke pihak lainnya.

Sejumlah studi yang dilakukan oleh World Bank (Bank Dunia) memperkirakan BRI memiliki kemampuan untuk meningkatkan arus perdagangan pada 149 negara peserta sebesar 4,1%, memangkas biaya perdagangan global sebesar 1,1% hingga 2,2%, serta menumbuhkan PDB negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik dengan rata-rata 2,6 hingga 3,9%. Centre for Economics and Business Research (CEBR) juga menyimpulkan bahwa program ini kemungkinan akan

menarik lebih banyak negara di dalam lingkup global untuk bergabung, jika infrastruktur global terbukti dalam perkembangannya dan memperoleh momentum.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Di masa pandemi Covid-19, organisasi internasional baik global maupun regional menjadi wadah bagi negara-negara untuk berkolaborasi dalam mengatasi dampak pandemi. APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), sebagai organisasi yang berfokus pada isu ekonomi dan perdagangan, telah menerapkan kebijakannya sendiri untuk menghadapi pandemi Covid-19. APEC dengan sigap merespons pandemi ini dengan melakukan berbagai inisiatif pemulihan ekonomi. Inisiatif ini melibatkan komitmen tinggi dari negara anggota, analisis dan saran ahli, serta inovasi dan proyek praktis dalam kerja sama anggota APEC.

Visi APEC Putrajaya 2040, yang dihasilkan dari APEC 2020 di KTT, telah menjadi prioritas kerja sama APEC selama dua puluh tahun ke depan. Visi tersebut bertujuan untuk menciptakan komunitas Asia-Pasifik yang terbuka, dinamis, tangguh, dan damai pada tahun 2040, untuk kemakmuran semua orang di kawasan ini dan generasi mendatang. Ini akan dicapai melalui tiga penggerak ekonomi: perdagangan dan investasi; inovasi dan digitalisasi; dan pertumbuhan yang kuat, seimbang, aman, berkelanjutan, dan inklusif. APEC akan terus berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan perdagangan dan investasi yang bebas, terbuka, adil, tidak diskriminatif, transparan, dan dapat diprediksi. Untuk berpartisipasi dan berkembang dalam ekonomi global yang saling terhubung,

APEC akan mengembangkan lingkungan yang mendukung yang digerakkan oleh pasar dan didukung oleh ekonomi digital dan inovasi. Selanjutnya, untuk memastikan kawasan Asia-Pasifik tahan terhadap krisis, pandemi, dan keadaan darurat lainnya, APEC akan mendorong pertumbuhan berkualitas yang memberikan manfaat nyata serta kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik untuk semua.

Visi APEC Putrajaya sangat penting dalam menghadapi era pasca pandemi, di mana fasilitasi investasi yang efisien dapat membantu lembaga promosi investasi dalam menarik investasi ke area pertumbuhan baru seperti teknologi digital, ekonomi sirkular, telekomunikasi, e-commerce, dan pertanian di kawasan Asia-wilayah Pasifik. Negara-negara dapat memanfaatkan Foreign Direct Investment (FDI) untuk pemulihan ekonomi yang kuat dari Covid-19 dengan menghindari kebijakan proteksionis, memanfaatkan peluang baru dari perubahan FDI dan tren rantai pasokan, dan mempromosikan kerja sama global. Mengingat APEC juga telah mengadopsi Rencana Aksi Fasilitasi Investasi APEC pada tahun 2008, yang selanjutnya disempurnakan dalam Deklarasi Kuala Lumpur dan Visi Putrajaya 2040, APEC memiliki kerangka kerja yang komprehensif untuk memfasilitasi investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pertukaran pengalaman antar negara anggota APEC mengacu pada berbagi pengetahuan, praktik terbaik, dan pembelajaran antar negara anggota di kawasan Asia-Pasifik. APEC berfungsi sebagai forum ekonomi regional yang terdiri dari 21 negara anggota, termasuk Amerika Serikat, China, Jepang, Australia, Kanada, dan banyak lainnya.

Tujuan utama APEC adalah untuk mempromosikan perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka di kawasan Asia-Pasifik. Salah satu cara

APEC mencapai tujuan tersebut adalah melalui pertukaran pengalaman dan informasi antar negara anggota. Pertukaran ini terjadi melalui berbagai mekanisme, termasuk pertemuan, konferensi, seminar, lokakarya, dan kelompok kerja. Ekonomi anggota APEC mengakui manfaat belajar dari pengalaman satu sama lain di berbagai bidang seperti pembangunan ekonomi, fasilitasi perdagangan, akses pasar, regulasi bisnis, teknologi, inovasi, pembangunan berkelanjutan, dan lainnya. Dengan berbagi keahlian, kisah sukses, dan tantangan mereka, ekonomi anggota dapat memperoleh wawasan tentang kebijakan, strategi, dan pendekatan yang efektif yang telah berhasil di negara lain.

Pertukaran pengalaman di negara-negara anggota APEC membantu memfasilitasi kerjasama ekonomi dan integrasi regional. Ini memungkinkan ekonomi untuk belajar dari keberhasilan dan kegagalan negara lain, membantu mereka membuat keputusan berdasarkan informasi dan mengadopsi kebijakan yang lebih selaras dengan tren regional dan global. Proses saling belajar dan kolaborasi ini berkontribusi pada pertumbuhan, stabilitas, dan kemakmuran ekonomi secara keseluruhan di kawasan Asia-Pasifik. Selain pertemuan dan acara formal, APEC juga mendorong interaksi dan jejaring informal antar negara anggota. Serta berbagi pengalaman informal sering terjadi selama diskusi bilateral atau multilateral di sela-sela.

Kerjasama pembangunan infrastruktur yang terjadi kepada negara-negara APEC dalam BRI merupakan salah satu hal yang berpotensi untuk meningkatkan PDB global, khususnya di negara-negara berkembang, terlebih lagi pasca ragam krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19. BRI sendiri juga dikatakan, untuk meningkatkan perdagangan dan investasi dalam program

BRI, pihak yang terkait akan meningkatkan mekanisme kerjasama bilateral dan multilateral di BRI yang fokus pada komunikasi kebijakan, konektivitas infrastruktur, fasilitasi perdagangan, aliran modal, dan pertukaran dari satu pihak ke pihak lainnya.

BRI, dalam pelaksanaan serta kepentingan yang hadir, dalam bidang zona perdagangan bebas di sepanjang Jalur Sutra, tentu akan hadir upaya penerapan strategi kawasan perdagangan bebas yang akan secara bertahap membangun jaringan kawasan perdagangan bebas berstandar tinggi, dengan terlibat secara aktif dalam negosiasi dengan berbagai negara serta wilayah yang hadir di sepanjang rute. Demi meningkatkan kerja sama keuangan di kawasan untuk mendanai infrastruktur, program BRI juga tentu akan memperkuat kerjasama dengan beragam organisasi internasional, yang mana tentu juga termasuk organisasi serta lembaga keuangan internasional, dan bekerja aktif untuk mempromosikan pengembangan Asian Infrastructure Investment Bank and the New Development Bank demi menempatkan biaya Jalur Sutra untuk penggunaan yang efektif, dan menarik modal internasional untuk penciptaan platform kerjasama keuangan yang terbuka, pluralistik, dan saling menguntungkan.

Fokus dalam BRI, seperti yang telah dinyatakan oleh Cina, adalah tentang membangun dan meningkatkan fasilitas perdagangan dan investasi nasional Cina dalam kawasan regional, yang mana dengan demikian juga akan mendorong perkembangan negara-negara tetangga di sekitar mereka, serta secara strategis menopang bidang keamanan energi, sumber daya, dan pangannya dengan mengambil peran kepemimpinan regional dengan tetangganya yang paling penting. Hal ini mempunyai cakupan yang sangat

luas meliputi konektivitas ekonomi, strategis dan budaya.

Daftar Pustaka

Acuan dari buku:

Ahyar, H., & Juliana Sukmana, D. 2020. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Prenadamedia Group.

<https://www.researchgate.net/publication/340021548>

Fitrah, M., & Luthfiyah. 2017. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. CV Jejak.

Acuan artikel dalam jurnal:

Joseph, P. 2016. Dependency Theory. In *The SAGE Encyclopedia of War: Social Science Perspectives*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781483359878.n191>

Kay, C. 2005. André Gunder Frank: From the “development of underdevelopment” to the “world system.” In *Development and Change* (Vol. 36, Issue 6, pp. 1177–1183). <https://doi.org/10.1111/j.0012-155X.2005.00455.x>

Leiss, W. 1977. The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century, Immanuel Wallerstein, New York: Academic Press, 1974, pp. xiv, 410, dalam *Canadian Journal of Political Science*, 10(1), pp. 202–203.

<https://doi.org/10.1017/s0008423900039573>

Maiwan, M. 2017. Geografi, Geopolitik, dan Globalisasi: Suatu Analisa Terhadap Teori Sistem Dunia Immanuel Wallerstein. *Jurnal SPATIAL - Wahana Komunikasi Dan Informasi Geografi*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/spatial.171.01>

Medeiros, V., & Ribeiro, R. S. M. 2020. Power infrastructure and income inequality: Evidence from Brazilian state-level data using dynamic panel data models. *Energy Policy*, 146.

<https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111734>

So, A. Y. 1990. Alvin Y. So - Social Change and Development. *Modernization, Dependency, and World-System Theories-SAGE (1990)* (Issue 1).

Sorinel, C. 2010. Immanuel Wallerstein’s World System Theory. *Annals of Faculty of Economics*, 1(2), 220–224. https://econpapers.repec.org/article/orajournal/v_3a1_3ay_3a2010_3ai_3a2_3ap_3a220-224.htm

Sun, M., Xu, X., Wang, L., Li, C., & Zhang, L. 2021. Stable energy, energy inequality, and climate change vulnerability in Pan-Third Pole regions: Empirical analysis in cross-national rural areas, dalam *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 147.

<https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111197>

Weixing, H. 2013. Building Asia-Pacific Regional Institution: The Role of APEC, dalam *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 77, pp. 65–73.

<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.03.063>